

Implementasi Program Wisata Pantai Karangjahe Di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Zahra Annafi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
zahra.17040674073@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar yang dapat membantu meningkatkan ekonomi dari daerah hingga nasional. Pemanfaatan dan pengembangan potensi wisata dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Selain itu, pariwisata dapat membuka lapangan kerja baru, penggerak ekonomi kreatif dan membuka peluang usaha-usaha lokal semakin berkembang. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong desa untuk mengembangkan potensi desa wisatanya. Dari desa wisata yang ada di Kabupaten Rembang, yang memiliki jumlah pengunjung paling banyak adalah Desa Punjulharjo dengan Wisata Pantai Karangjahe sebagai daya tarik utamanya. Untuk itu penelitian ini membahas tentang implementasi program desa wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah implementasi Program Wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan program desa wisata khususnya di wisata Pantai Karangjahe sudah terlaksana dengan baik, keadaan ekonomi masyarakat sudah mengalami peningkatan. Dalam pengelolaan masih terdapat kendala yaitu pada sumber daya manusia bagian pengembangan dan sarana prasarana yang perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu 1) Diharapkan membuat area wisata kuliner untuk makanan dan minuman khas, 2) Diharapkan pengelola menambah jumlah tempat sampah dan menekankan tentang kebersihan, 3) Diharapkan lebih memperhatikan fasilitas spot selfie.

Keywords: Implementasi, Kebijakan, Desa Wisata

Abstract

Tourism is one of the largest contributors to revenue that can help improve the economy from regional to national. Utilization and development of tourism potential can be used to increase regional economic income. In addition, tourism can create new jobs, drive the creative economy and open up opportunities for local businesses to grow. In 2018, the Rembang Regency Government continued to encourage villages to develop the potential of their tourism villages. Of the existing tourist villages in Rembang Regency, the one with the highest number of visitors is Punjulharjo Village with Karangjahe Beach Tourism as its main attraction. For this reason, this study discusses the implementation of the tourism village program in order to improve the community's economy in Punjulharjo Village, Rembang District, Rembang Regency. The purpose of this research is to describe the implementation of Karangjahe Beach Tourism Program in Punjulharjo Village. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is the implementation of Karangjahe Beach Tourism Program in Punjulharjo Village which is reviewed using the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The method used in this research is descriptive method. The results of the research are the implementation of the tourism village program, especially in Karangjahe Beach tourism, has been carried out well, the economic condition of the community has increased. In management, there are still obstacles, namely in the human resources development section and infrastructure facilities that need to be improved. Based on the research results, suggestions that can be given are 1) It is expected to create a culinary tourism area for specialty foods and drinks, 2) It is expected that the manager will increase the number of trash cans and emphasize cleanliness, 3) It is expected to pay more attention to the selfie spot facilities.

Keywords: Implementation, Policy, Tourism Village.

PENDAHULUAN

Pariwisata saat ini menjadi sektor yang strategis dalam upaya pembangunan nasional, oleh karena itu perlu disusun rencana strategis sebagai bagian penting proses dalam pengembangan sektor wisata sesuai segala potensi dan kekayaan alamnya. Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan oleh karena itu Indonesia memiliki berbagai tempat wisata pesisir telah dikembangkan sekalipun belum sama sekali. Melihat peluang yang tersedia di Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau, wisata bahari adalah bentuk tempat rekreasi potensial yang akan memberikan kontribusi nyata dalam beragam aspek secara positif, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya Spillane, 2004:14, (dalam Nurhajati et al., n.d.).

Dalam hal ini pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia sedang dilakukan untuk menarik tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga internasional atau mancanegara. Upaya-upaya pemerintah dalam pembangunan destinasi wisata ini perlu didukung oleh seluruh kalangan masyarakat. Di Indonesia, setiap daerah otonom memiliki tanggungjawab untuk mengelola anggarannya sendiri karena negara ini menerapkan sistem desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Bupati (PerBup) Rembang dalam No 40 Pasal 1 ayat (6), yang berbunyi bahwa desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi yang meliputi potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakatnya.

Desa wisata sangat penting untuk dikembangkan tidak hanya untuk mengembangkan perekonomian secara global, namun khususnya mengembangkan ekonomi desa itu sendiri melalui potensi-potensi wisata yang dimiliki dengan ciri khasnya masing-masing sehingga memiliki daya tarik yang otentik dari setiap wisata yang ada. Dalam hal itu pariwisata tak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut, melainkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat untuk mandiri, membuka peluang usaha, dan memberikan lapangan kerja.

Meskipun Pulau Jawa mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan pulau lain di Indonesia, pulau ini juga dikenal karena memiliki berbagai destinasi wisata yang berkembang pesat dan dilengkapi dengan infrastruktur yang baik. Dalam hal ini potensi yang dimiliki di Pulau Jawa sangat beragam dan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menikmati secara langsung potensi wisata itu sendiri. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, menawarkan beragam destinasi wisata serta memiliki daya tarik yang sangat kuat. Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa wilayah yakni 6 kota

dan 29 kabupaten, dimana masing-masing mempunyai karakteristik geografis yang beragam, membentuk potensi wisata yang berbeda-beda.

Berikut disajikan data jumlah pengunjung tempat wisata secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1 Jumlah Pengunjung Tempat Wisata di Jawa Tengah

Tahun	Wisatawan/ Visitors		Jumlah Wisatawan
	Mancanegara/ Internasional	Domestik/ Domestik	
2018	677.168	49.943.607	50.620.775
2019	691.699	57.900.863	58.592.562
2020	78.290	22.629.085	22.707.375
2021	1.793	21.332.409	21.334.202
2022	144.691	46.465.437	46.610.128

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka bisa ditarik kesimpulan dengan banyaknya wisatawan domestik maupun internasional mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023)

Salah satu di Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi aktif berupa pengembangan pariwisata dan getol dalam membangun program desa wisata ialah Kabupaten Rembang yang mempunyai banyak sekali potensi, tetapi masih banyak belum tereksplorasi atau dikembangkan sebagai objek wisata. Saat ini, Kabupaten Rembang memiliki 28 desa wisata produktif yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa dengan dilengkapi berbagai sarana dan prasana yang memadai (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Rembang, 2024).

Meskipun minat wisatawan mancanegara masih tergolong sedikit, namun minat masyarakat domestik sangat besar. Kabupaten Rembang masih mampu bersaing dalam sektor pariwisata dan berhasil menduduki urutan ketiga dalam Kunjungan Wisata terbanyak se-Jawa Tengah pada momen libur lebaran lalu, dibawah Kota Semarang dan Kabupaten Klaten (Redaksi Pemerintah Kabupaten Rembang, 2024).

Berikut data jumlah Kabupaten/Kota dengan kunjungan wisata 3 terbanyak se-Jawa Tengah:

Tabel 2 Jumlah Kabupaten/Kota pengunjung wisata terbanyak di Jawa Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Wisatawan
1	Kota Semarang	462.192
2	Kabupaten Klaten	375.433
3	Kabupaten Rembang	305.688

Sumber: (Redaksi Pemerintah Kabupaten Rembang, 2024)

Berdasarkan tabel 2 diatas tentu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak dapat dipisahkan dari banyaknya

objek wisata di Kabupaten Rembang yang beragam dan menarik dengan ciri khasnya masing-masing Desa Wisata yang ada, sekaligus infrastruktur yang cukup layak.

Berikut data kunjungan wisatawan menurut objek wisata di Kabupaten Rembang:

Tabel 3 Jumlah Pengunjung Wisata berdasarkan Objek Wisata di Kabupaten Rembang:

Objek Wisata	Jumlah Wisatawan
Pantai Karangjahe, Punjulharjo	88.450
Pantai Pasir Putih, Tasikharjo	53.606
Pantai Balongan, Balongmulyo	37.040
Komplek Masjid Jami', Lasem	18.684
Pantai Caruban, Gedongmulyo	17.814
Taman Rekreasi Pantai Kartini	15.563

Sumber: (Redaksi Pemerintah Kabupaten Rembang, 2024)

Melalui tabel 3 di atas, tempat wisata yang paling diminati oleh wisatawan ialah pantai. Hal ini dikarenakan Kabupaten Rembang terletak pada ujung paling timur laut Provinsi Jawa Tengah.

Dalam perkembangan industri pariwisata, mampu berperan menjadi sebagian dari sumber pendapatan Negara (Spillane dalam (Ridwan, 2020). Pengembangan pariwisata sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di daerah tujuan wisata. Salah satu diantaranya adalah terjadi perubahan pada pekerjaan penduduk lokal, disebabkan adanya kegiatan wisata di wilayah itu agar dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta peluang usaha mandiri masyarakat. Dalam hal ini Kabupaten Rembang jelas turut andil menjadi sumber pendapatan asli daerah dan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru, sekaligus membuka peluang usaha mandiri dari masyarakat setempat.

Pada tahun 2009, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata yang memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang sadar akan pariwisata. Pada akhir tahun 2011, program tersebut sudah berhasil mengembangkan sebanyak 569 desa wisata diseluruh Indonesia dan meningkat hingga saat ini.

Pengembangan desa wisata sejatinya merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 Ayat (1) yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang secara harfiah dapat diartikan bahwa pengembangan desa wisata merefleksikan konsep ekonomi kerakyatan, dimana masyarakat secara bebas aktif dapat mengembangkan perekonomiannya secara mandiri.

Melihat begitu banyaknya potensi wisata yang dapat dikembangkan, Pemerintah Kabupaten Rembang secara terus menerus menggali dan mencari potensi-potensi baru untuk dioptimalkan, menjadi desa wisata yang dicita-citakan serta bisa memberikan sumbangsih positif dalam segala aspek yang ada.

Desa Punjulharjo merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir pantai Kabupaten Rembang adalah tepatnya berada di Pantai Utara Laut Jawa. Desa Punjulharjo adalah desa wisata yang memiliki beberapa potensi pariwisata yang mana menawarkan paket wisata yang meliputi Daya Tarik Wista Pantai Karangjahe, Situs Perahu Kuno, Edukasi Pembuatan Garam, Edukasi Pembuatan Bandeng Presto, Edukasi Pembuatan Manisan Kraiku, serta Edukasi Seni dan Budaya. Pantai Karangjahe menjadi daya tarik wisata yang sejak awal pembentukannya hingga saat ini masih mendominasi sebagai tempat wisata dengan kunjungan paling banyak oleh wisatawan dan terus dikembangkan dengan baik hingga sekarang secara maksimal.

Salah satu destinasi yang memiliki daya tarik wisata di Desa Punjulharjo adalah Wisata Pantai Karangjahe. Karena dalam pengelolaannya destinasi wisata Pantai Karangjahe menjadi sebagian dari penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sangat besar. Pada tahun 2013, pengelolaan wisata Pantai Karangjahe saat itu masih dikelola oleh organisasi kepemudaan yakni Karang Taruna setempat, lalu pada tahun 2015 pengelolaan dan manajemen objek wisata Pantai Karangjahe melakukan transisi pengelolaan yang pada awalnya dikelola oleh Karang Taruna kemudian berpindah kemudi dalam pengelolaan Badan Pengelola Karangjahe Beach (BP-KJB) dan juga BUMDes Punjulharjo.

Manajemen objek wisata mencakup komponen-komponen dalam penggunaannya yang menggabungkan pengaturan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggunaan program, pengecekan dan penilaian menurut Damanik & Teguh (dalam Nadina & Dwimawanti, n.d.). Selama 11 tahun berdiri, Pantai Karangjahe dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan, terkait implementasi pengelolaan dalam program desa wisata.

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk menemukan permasalahan pada fungsi Implementasi Kebijakan Program Desa Wisata. Implementasi yang baik harus mampu memenuhi berbagai sarana dan prasana yang terus dilakukannya pengembangan juga evaluasi secara berkala dan dilaksanakan secara maksimal. Pengembangan sarana dan prasarana adalah faktor utama dalam pengelolaan pantai yang baik (Triyono & Nugroho, 2023). Mengingat Pantai Karangjahe beberapa kali meraih penghargaan

yakni sebagai 5 besar terbaik atau Juara Harapan dua (2) sebagai Kawasan Wisata Nusantara pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Selain itu, Pantai Karangjahe juga berhasil merebut Juara 2 pada ajang Jambore Kelompok Sadar Wisata kategori konvensi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pada tahun 2021 (Mustofa, 2021).

Sarana yang dimiliki Pantai Karangjahe yakni meliputi Pengelola Wisata, Petugas-petugas Wisata, Atraksi Wisata Penyewaan Perahu Mesin, Penyewaan ATV, Penyewaan Kereta Motor dirasa sudah cukup memenuhi kebutuhan wisatawan dalam menikmati waktu berliburnya. Sedangkan Prasarana yang meliputi Aksesibilitas Wisata (Lahan Parkir, spot foto yang menarik), Sekretariat, Mushola, Toilet Umum, Wahana Permainan, Tempat Sampah, Kios Aksesoris Pakaian dan Kios Makanan juga Minuman, Gazebo dan Area Makan.

Namun persoalan yang cukup serius dalam segi prasarana. Area wisata masih cukup banyak sampah yang berserakan dan tertiuip angin, ini dikarenakan masih minimnya kesadaran akan kebersihan lingkungan oleh wisatawan dan beberapa pelaku wisata sehingga tak sedikit yang membuang sampah sembarangan. Hal ini dipengaruhi juga akan minimnya tempat sampah yang ada sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat, tempat-tempat sampah tersebut dirasa cepat penuh, kurangnya kesadaran pengelola terhadap petugas kebersihan mengenai waktu operasional kerja karena petugas kebersihan hanya dapat dijumpai di beberapa waktu tertentu tepatnya disaat sebelum pantai dibuka dan saat pantai ditutup.

Disisi lain, kebersihan toilet umum yang ada juga turut membuat wisatawan merasa kurang nyaman dalam menggunakannya, mulai dari kebersihannya yang kurang terjaga, lantai dan dinding terlihat kotor. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai aksesibilitas objek wisata, aksesibilitas yang ada di Pantai Karangjahe adalah lahan parkir kendaraan. Khususnya lahan parkir kendaraan untuk roda empat di Pantai Karangjahe belum dapat menampung kendaraan wisatawan yang berkunjung pada hari-hari libur nasional seperti momen lebaran dan hari-hari besar lainnya.

Untuk mencapai tujuan suatu penyelenggaraan kepariwisataan, harus adanya keterpaduan dan keseimbangan peran antara pemerintah, badan usaha terkait dan masyarakat yang ada di suatu wilayah objek wisata. Karena, dengan penyelenggaraan diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Upaya dalam pengelolaan wisata ini ditujukan agar masyarakat tidak merasa tersisihkan, dan hanya dianggap sebagai penonton saja namun

membutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan wisata

Diantaranya permasalahan yang peneliti temui dan amati adalah sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Sarana dan prasarana yang ditemui di Wisata Pantai Karangjahe memiliki masalah kebersihan, mulai dari kurangnya tempat sampah di area wisata Pantai Karangjahe sehingga tidak dapat menampung kebutuhan pengunjung secara keseluruhan dan masalah lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya sekaligus peran para pemangku kepentingan dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Hal ini tidak berkesinambungan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (6) Huruf d yang berbunyi menyiapkan fasilitas prasarana dan sarana yang sudah ditetapkan. Kebersihan adalah ciri dari lingkungan yang higienis, Rawung dalam (Nadina & Dwimawanti, n.d.).

Tempat sampah tidak memadai untuk jumlah pengunjung yang sangat banyak, para petugas kebersihan hanya dikerahkan pada sebelum pantai wisata dibuka, dan pada jam tertentu. Permasalahan selanjutnya adalah kebersihan pada dinding dan lantai toilet. Toilet umum harus dikekola dengan baik, dan pengelola harus meninjau kebersihan, dan kesehatan juga mengutamakan kenyamanan pengunjung wisata Pantai Karangjahe Rembang.

Uraian tersebut merupakan gambaran secara umum pelaksanaan serta hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo. Dari latar belakang dan juga beberapa permasalahan yang telah ditulis, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Wisata Pantai Karangjahe Di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang implementasi program Wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo. Penelitian dilakukan di Wisata Pantai Karangjahe yang terletak di Dukuh Belah, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Fokus penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2018) terkait ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pihak yang mengerti serta ikut terlibat dalam implementasi program ini yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Pemerintah Desa Punjulharjo, Unit Pengelola Pantai Karangjahe, Masyarakat Desa Punjulharjo, dan Wisatawan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan kegiatan observasi di lapangan dengan mengamati secara langsung kondisi wisata pantai karangjahe, mengamati secara langsung perilaku pelaku usaha dan pengelola wisata pantai karangjahe, melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Perangkat Desa Punjulharjo, Unit Pengelola Wisata Pantai Karangjahe, Pengunjung, serta masyarakat Desa Punjulharjo. Data sekunder dapat digunakan sebagai informasi pendukung data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah laporan-laporan, dokumen dari Unit Pengelola Wisata Pantai Karangjahe, Narasumber atau informan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Punjulharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 4 dukuh, yaitu Godo, Jetak, Belah dan Kiringan. Pembagian lahan yang ada di Desa Punjulharjo ternyata menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Terkait kekuatan wisata yang ada di Desa Punjulharjo maka ditawarkan dalam Program Wisata Pantai Karangjahe terdapat paket wisata yang dimiliki oleh Desa Punjulharjo diantaranya, Daya Tarik Wisata Pantai Karangjahe, Edupark Perahu Kuno, Edukasi Pembuatan Garam, Edukasi Pembuatan Bandeng Presto, Edukasi Pembuatan Manisan Kraiku, serta Edukasi Seni Budaya.

Implementasi Program Wisata Pantai Karangjahe

Penelitian implementasi Program Wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut data primer dan sekunder, maka peneliti akan mengkaji penelitian dengan menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan 6 variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, kondisi ekonomi sosial dan politik, serta komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad R, 2018) ukuran dan tujuan kebijakan adalah hal yang sangat penting karena mengarah pada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Ketika pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan dengan baik tentu akan sesuai dengan keinginan yang direncanakan. Sasaran serta kejelasan suatu program dapat dilihat dengan jelas agar dapat diketahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah direncanakan. Suatu kebijakan dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Dengan ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas, maka tidak akan timbul perbedaan pendapat antara para pelaksana program desa wisata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tujuan implementasi program desa wisata yakni menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah salah satu kebijakan utama Kabupaten Rembang untuk menjadi pedoman dalam pemberdayaan desa wisata. Sebagai lanjutan dari peraturan bupati tersebut, Pemerintah Desa Punjulharjo mengeluarkan Perdes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe dan Edupark Situs Perahu Kuno.

Dalam implementasi program wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo, tujuan dari adanya program wisata Pantai Karangjahe yang berkaitan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 adalah memberdayakan masyarakat di bidang pariwisata, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan asli desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sepertinyng diungkapkan oleh Ibu Taufikur Rohmah.

“Tujuan dari program desa wisata ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat serta menaikkan taraf ekonomi masyarakat Desa Punjulharjo, serta memaksimalkan potensi yang ada di Desa Punjulharjo terlebih dengan program desa wisata ini dapat berlanjut dan dapat mendapatkan APBDes. Sudah benar-benar dirasakan, jika dulu ibu-ibu hanya berdiam diri dirumah sekarang ini sudah banyak yang kerja atau berjualan di Pantai Karangjahe ini. Pada bidang pendidikan, dulu banyak putus sekolah, setelah selesai mondok menikah atau hanya pada jenjang SMA tetapi sekarang banyak yang sudah kuliah karena sadarnya bahwa pendidikan itu penting”.

Ukuran keberhasilan dalam program wisata Pantai Karangjahe adalah meningkatnya pendapatan asli desa, banyaknya kunjungan wisata serta meningkatnya

perekonomian masyarakat desa Punjulharjo. Serta mendapatkan beberapa penghargaan.

Sasaran dalam program wisata Pantai Karangjahe adalah masyarakat Desa Punjulharjo. Hal ini tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 2 Pasal 12 ayat 1, yang menjadi pedagang dan penyedia wahana wisata adalah masyarakat desa Punjulharjo dengan menunjukkan KTP dan KK. Dan tercantum dalam pasal 5 bahwa, pengelola objek wisata adalah kelompok masyarakat yang ditunjuk dan dipilih BUMdesa dan diajukan kepada kepala desa. Dibuktikan dengan 386 pelaku wisata serta 32 pegawai unit wisata berasal dari masyarakat Desa Punjulharjo.

Berdasarkan penjelasan tersebut dijelaskan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi program wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo sudah sesuai dengan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan dari memberdayakan masyarakat di bidang pariwisata, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan asli desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ukuran keberhasilan dalam program wisata Pantai Karangjahe adalah meningkatnya Pendapatan Asli Desa, banyaknya kunjungan wisata serta meningkatnya perekonomian masyarakat desa Punjulharjo, dan mendapatkan beberapa penghargaan. Sasaran dalam program ini adalah masyarakat desa punjulharjo didukung dengan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 tahun 2023 pasal 12 ayat 1 yang menyatakan yang menjadi pedagang dan penyedia wahana wisata adalah masyarakat Desa Punjulharjo dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dan tercantum dalam pasal 5 bahwa, pengelola objek wisata adalah kelompok masyarakat yang ditunjuk dan dipilih BUMDesa dan diajukan kepada kepala desa.

2. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad R, 2018) selain indikator kinerja kebijakan dan tujuan kebijakan harus jelas, sumber daya pendukung pelaksana kebijakan juga tidak dapat dihiraukan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya dana, materi, manusia, dan berbagi insentif ketika berhasil dalam pelaksanaan pekerjaannya diberi hadiah, bagi yang gagal akan mendapatkan hukuman. Dalam implementasi program wisata pantai karangjahe di desa punjulharjo, ketersediaan sumber daya terkait yaitu dari Unit Pengelola Pantai Karangjahe. Adapun dalam analisis mengenai ketersediaan sumber daya terbagi ke dalam beberapa variabel, yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi penggerak pelaksana kebijakan. Hal ini yang dimaksud

penggerak adalah masyarakat Desa Punjulharjo. Dari awal perencanaan masyarakat Desa Punjulharjo selalu diajak oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon dari masyarakat yaitu mendukung adanya program desa wisata ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut beberapa narasumber sumber daya manusia yang menangani program desa wisata cukup baik, namun memiliki kekurangan pada bidang pengembangan, maksudnya adalah terlalu monoton tidak ada ide baru atau inovasi untuk dibuat seperti apa wisata Pantai Karangjahe ini agar lebih maju dan ketika pengunjung datang lagi yang dilihat tidak itu-itu saja dan sumber daya manusia belum maksimal serta belum tertarik untuk terlibat langsung di pengelolaan desa wisata. Khususnya dari pemuda lebih suka bekerja yang hasilnya menjanjikan.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber anggaran adalah hal yang penting dalam pelaksanaan desa wisata. Daya Tarik Wisata di Desa Punjulharjo adalah Wisata Pantai Karangjahe, hal ini dibuktikan dengan pendapatan asli desa yang paling besar bersumber dari wisata ini. Jika dilihat, apakah sumber dana sudah memadai? Tentu belum, namanya kita sebagai desa wisata pasti tidak memiliki rasa puas. Artinya ingin selalu membuat perbaruan dan wisatawan yang datang akan melihat apa yang beda dari Desa Punjulharjo ini.

Biaya pengelolaan berasal dari hasil penjualan tiket parkir, retribusi, bantuan pemerintah, sewa kios/warung dan perijinan operasional. Dalam pelaksanaannya Unit Pengelola Pantai Karangjahe selalu transparansi terkait anggaran dan pengelolaan keuangan wisata. Setiap satu bulan sekali, pihak Unit Pengelola Pantai Karangjahe selalu melakukan rapat bersama BUMDes, Pemerintah Desa, BPD, LPMD, untuk melakukan pelaporan keuangan. Uang hasil dari Wisata Pantai Karangjahe akan disetorkan kepada pihak BUMDes setelah dipotong biaya operasional. Selain itu, pihak Desa Punjulharjo juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu berupa pembangunan jalan, pembangunan loket, serta bantuan dari swasta yaitu CSR pembangunan kamar mandi, dan gapura Desa Punjulharjo.

Masyarakat desa telah mendapatkan hasil dari program desa wisata ini, walaupun tidak semuanya. Yang menjadi sasaran adalah masyarakat Desa Punjulharjo, dengan lokasi yang terbatas tentu tidak semuanya bisa masuk kedalam pelaku wisata di Wisata Pantai Karangjahe.

c) Fasilitas

Sumber daya fasilitas merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya fasilitas meliputi sarana dan prasarana dalam implementasi program Pantai Karangjahe.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pantai Karangjahe fasilitas yang ada diantaranya, mushola, toilet, parkir motor dan mobil, pos keamanan, loket, kantor, panggung acara, pos penyuluhan, gedung pertemuan, gazebo, jalan disabilitas, spot selfie, warung kuliner/ kios souvenir, gardu pandang SAR laut. Namun dengan banyaknya fasilitas yang ada tentu ada beberapa kendala, seperti yang diutarakan oleh dua pelaku wisata/jasa yaitu dengan kurangnya spot selfie yang mana ini justru menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Spot selfie yang ada sudah kurang terawat, seharusnya ada pengecekan berkala dan pengecatan ulang agar tidak terkesan usang.



Gambar 1 Spot Selfie Pantai Karangjahe

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Selanjutnya adalah pada fasilitas toilet, berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa wisatawan kurang nyaman dengan toilet yang ada. Hal ini dikarenakan, dinding di dalam kamar mandi banyak lumut dan menjadikan kesan kotor.



Gambar 2 Kamar Mandi yang Kotor di Pantai Karangjahe

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Masalah selanjutnya adalah lingkungan yang terkesan kotor hal ini dikarenakan saat hari libur tentu banyak wisatawan yang berkunjung di wisata

Pantai Karangjahe. Banyak sekali sampah tempurung kelapa yang tidak dibuang ke tempat sampah, justru oleh pedagang diletakkan di dekat tempat sampah dan tidak dimasukkan, ke dalam tempat sampah. Jumlah tempat sampah tidak sebanding dengan jumlah sampah yang ada.



Gambar 3 Sampah di Pantai Karangjahe

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seksi kebersihan menyatakan bahwa jika sampah diangkut pada saat masih ada wisatawan, tentu akan mengganggu pemandangan dan kurang nyaman jika dilihat oleh wisatawan. Baik pelaku wisata juga harus memiliki tanggungjawab untuk tidak meletakkan tempurung kepala yang ada di dekat tempat sampah dan harus menjaga kebersihan warungnya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad R, 2018) karakteristik agen pelaksana meliputi sikap-sikap dari implementor kebijakan. Masing-masing agen pelaksana memiliki peran masing-masing serta berpengaruh pada pelaksanaan program.

Agen pelaksana yang ikut terlibat dalam implementasi kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Dalam pelaksanaan implementasi program wisata Pantai Karangjahe tentu menggandeng beberapa pihak. Antara lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan banyak lagi. Dalam pelaksanaan implementasi program wisata Pantai Karangjahe yang menjadi implementor adalah Unit Pengelola Pantai Karangjahe yang berada di naungan BUMDes dan Pemerintah Desa Punjulharjo. Tentunya seluruh elemen harus saling suportif dalam perannya masing-masing yaitu pemerintah daerah pemerintah desa unit pengelola hingga masyarakat desa secara keseluruhan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah sesuai dan selalu melakukan evaluasi atau pembinaan. Karakteristik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang melakukan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan program desa wisata secara berkala. Karakteristik Pemerintah Desa

Punjulharjo selalu memantau dan mengawasi terhadap pelaksanaan program desa wisata ini, selain itu pemerintah desa juga menjadi penasehat dalam pelaksanaan program ini.

Unit Pengelola Pantai Karangjahe juga melakukan pengawasan dan kontrol kepada pelaku wisata. Yang dilakukan diantaranya terkait regulasi penetapan harga, tidak boleh ada yang melebihi batas wajar dalam menjual suatu barang/ jasa. Hal ini dikarenakan sudah disepakati bersama ketika melakukan kegiatan rutin tiga bulan sekali. Serta selalu mengingatkan kepada pelaku wisata untuk menjunjung tinggi sikap sapta pesona karena kita harus sadar bahwa kita ini adalah desa wisata. Secara keseluruhan, antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran telah memiliki hubungan dan muncul komunikasi antara satu dengan yanglainnya sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan fleksibel.

Sesuai penelitian di lapangan, masing-masing agen pelaksana telah menjalankan peran dan tanggungjawabnya dengan baik, ini terbukti dengan masyarakat mengetahui peran masing-masing pelaksana. Unit pengelola Pantai Karangjahe memiliki banyak divisi, lalu setiap divisi memiliki tugas masing-masing sesuai dengan jobdescknya. Ketika terjadi suatu permasalahan yang mana ada kecelakaan, ada pengendara motor ATV menabrak pejalan kaki di bibir pantai, pihak pengelola sigap dalam menangani masalah tersebut dengan bertanggungjawab membawa ke rumah sakit terdekat agar korban dapat segera mendapatkan pertolongan hal ini sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 13 (7) dan (8), unit pengelola memiliki kewajiban untuk membantu menyelesaikan ketika terjadi musibah atau kecelakaan wahana wisata dan wajib membentuk tim penyelamat (SAR) untuk pengamanan laut, serta pihak pelaku wisata juga merasa pihak pengelola baik dan ramah maka dari itu mereka tidak sungkan untuk bertanya-tanya.

4. Disposisi

Disposisi implementor menurut Maulidiah & Megawati (2022), merupakan sikap yang ditunjukkan oleh agen pelaksana kebijakan dimana mereka akan menolak atau menerima dengan adanya kebijakan tersebut. Terdapat tiga komponen yang mempengaruhi kemampuan dalam melaksanakan kebijakan yaitu kognisi, respon, dan intensitas. Kognisi yang dimaksud adalah pengetahuan/pemahaman yang dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Respon berkaitan dengan apakah menerima atau menolak suatu kebijakan. Serta intensitas terhadap suatu kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

publik (Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus: 2006). Hal ini disebabkan oleh, pelaksana kebijakan merupakan perumus kebijakan bukan masyarakat.

Sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program Wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo, sikap dari pelaksana yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Desa, Unit Pengelola Wisata Pantai Karangjahe, BUMDes menunjukkan sikap menerima sejak kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya serta bekerja secara profesional. Selain itu pihak unit pengelola juga memiliki pelayanan yang baik seperti pembayaran retribusi dengan ramah.

Pemerintah daerah memiliki peran dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada desa wisata serta masyarakatnya. Yang dilakukan adalah dengan sosialisasi memberi pelatihan agar masyarakat desa lebih produktif lagi. Sedangkan pemerintah desa melakukan pengawasan dan menjadi penasehat kepada Unit Wisata Pantai Karangjahe.

Peran para pelaksana dalam menjalankan dan mengembangkan wisata pantai karangjahe telah berjalan sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tugas untuk mengurus laporan keuangan, dan ikut dalam pengambilan keputusan terkait program yang diusulkan apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Unit pengelola Pantai Karangjahe memiliki sikap terbuka dan mau menerima kritik. Artinya, pelaksanaan kebijakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam (Kasmad, 2018) lingkungan eksternal ikut dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif tentu menjadi faktor gagalannya suatu kebijakan dan menjadi sumber masalah dalam implementasi kebijakan. Dengan mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan harus fokus pada dampak lingkungan ekonomi, sosial dan politik untuk mempengaruhi hasil kebijakan (Thomas B Smith dalam Tachjan, 2006).

Dari aspek ekonomi, implementasi program desa wisata di Desa Punjulharjo ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Di Desa Punjulharjo mayoritas bekerja sebagai petani, serta memiliki kondisi ekonomi menengah

kebawah. Dengan adanya kebijakan ini memberikan manfaat serta dampak bagi masyarakat Desa Punjulharjo, yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Dapat dilihat bahwa saat ini terjadi peningkatan ekonomi masyarakat Desa Punjulharjo serta berkurangnya pengangguran. Kondisi perekonomian jika dibandingkan dengan sebelum adanya desa wisata, sudah jauh lebih baik dan masyarakat. Banyak masyarakat yang membuka usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti mengolah produk hasil pertanian yaitu krai (timun jawa) menjadi manisan kraiku, ikan bandeng menjadi bandeng presto sekarang sudah banyak inovasi baru.

Inovasi-inovasi tersebut menjadikan perekonomian masyarakat meningkat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga meningkat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak ditetapkannya Pantai Karangjahe menjadi objek wisata masyarakat desa setempat belum merasakan dampak positif terhadap dikembangkannya wisata Pantai Karangjahe ini namun, seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Punjulharjo dapat merasakan dampak positifnya secara langsung yang meliputi perubahan sosial ekonomi kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan ekonomi.

Dampak dari pariwisata akan menjadi alat yang mudah untuk memajukan kehidupan sosial masyarakat tentu hal ini sama dengan yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena berdampak pada kehidupan sosial (Kataya, 2021). Dari aspek sosial, saat ini lingkungan menjadi adaptif. Dahulu sempat menolak adanya wisata Pantai Karangjahe, namun setelah merasakan dampaknya yaitu pada kenaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tentu masyarakat saat ini sangat mendukung program ini. Tetapi juga memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu anak-anak yang biasanya pada sore hari mengisi waktu dengan sekolah ngaji lebih memilih untuk ikut orang tuanya di kawasan area wisata Pantai Karangjahe dibanding mengaji serta berdampak pada psikologit anak-anak yang melihat pasangan remaja bergandengan tangan di area Pantai Karangjahe.

Dalam aspek politik, yaitu dalam implementasinya dilakukan dengan musyawarah terkait pemilihan Ketua Unit Pengelola Wisata Pantai Karangjahe hal ini disetujui bersama karena perangkat desa dan pengelola BUMDes memiliki kepercayaan bahwa seseorang yang dipilih secara musyawarah adalah seseorang yang benar-benar berkualitas dibandingkan dengan pemilihan secara voting yang rawan kecurangan.

Hal ini selaras dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wisata Pantai Karangjahe untuk mengembangkan wisata pantai Karangjahe dan juga sependapat dengan Surat Keputusan

BUMDes

Abimantrana

Nomor

18/BUMDES/ABI/V/2023.

6. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas

Pelaksana Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (1974) komunikasi yang akurat serta konsisten akan menentukan suatu implementasi kebijakan itu efektif atau tidak. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada para pelaksana kebijakan mengenai standard dan tujuan kebijakan harus konsisten serta seragam dari berbagai informasi. Informasi yang diberikan harus bersifat akurat dan berasal dari sumber yang pasti. Maka dari itu komunikasi yang dibangun dan dikembangkan menjadi komunikasi yang efektif. Suatu implementasi kebijakan akan berhasil jika implementor supaya mengetahui apa yang harus dikerjakan dengan jelas.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana pada program wisata Pantai Karangjahe sudah berjalan dengan baik. Selalu ada komunikasi antar pelaksana kebijakan. Baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Pemerintah Desa Punjulharjo dan unit Pengelola Wisata Pantai Karangjahe. Dalam koordinasi dan komunikasi pengelolaan desa wisata telah dilakukan dengan baik. Selain itu, pihak pemerintah desa juga selalu berkomunikasi dengan unit pengelola wisata Pantai Karangjahe terkait apapun yang ada di lapangan. Jika terjadi suatu kendala atau permasalahan akan dibantu untuk menyelesaikannya. Peran organisasi kemasyarakatan dan masyarakat desa secara umum juga berjalan baik sesuai dengan indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Selanjutnya pihak pengelola unit wisata Pantai Karangjahe dalam berkomunikasi dan berkoordinasi kepada semua pihak pelaku wisata juga dilakukan dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh dua pelaku wisata jika dalam pengkomunikasian masalah atau informasi dilakukan dengan sejelas-jelasnya. Serta pelaku wisata juga diajak untuk berkontribusi dalam pengembangan area wisata seperti diajak untuk membuat suatu paguyuban yang dipergunakan untuk dapat memberikan kesempatan untuk mengutarakan kritik dan saran. Hanya saja, awal pembentukan wisata Karangjahe memiliki kendala yaitu, masyarakat desa di area wisata Pantai Karangjahe merasa tidak setuju. Hal ini dikarenakan merasa terganggu jika ada kendaraan yang lalu lalang serta banyaknya debu yang berterbangan. Anak-anak menjadi tidak bisa main, dan merasa kebisingan.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu pihak pengelola wisata Pantai Karangjahe beserta pemerintah desa dan karang taruna memberi arahan dan penjelasan jika dengan adanya desa wisata akan memberi dampak yang positif. Yaitu pada perekonomian masyarakat. Hal

ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad R, 2018) bahwa komunikasi yang terjalin secara intens dan sering melakukan pertemuan atau rapat maka komunikasi antar organisasi akan menjadi baik, hal ini dikarenakan jika semakin baik komunikasi yang terjalin tentu akan semakin kecil kendala atau kesalahan dalam implementasi program desa wisata.

Dalam indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan selalu ada komunikasi jika akan mengambil suatu keputusan, misalnya dalam satu bulan sekali pasti selalu diadakan rapat bersama Pemerintah Desa, BUMDes, serta unit lain untuk melaporkan mengenai keuangan dan penyampaian program yang sedang berjalan, yang akan dilaksanakan dan sudah berjalan. Jika ada program yang akan dilaksanakan tentu akan dipaparkan oleh pihak unit pengelola wisata Pantai Karangjahe beserta rencana anggaran dan gambaran terkait programnya. Adanya paguyuban untuk para pelaku wisata ini juga merupakan keputusan yang baik, agar dalam penyampaian informasi dapat menyeluruh sesuai dengan kelompok-kelompok paguyuban.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel ini, diantaranya:

1. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing.
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si dan Bu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing.
3. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
4. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang dalam bentuk dukungan, nasihat, serta melangitkan doa yang tiada henti.
5. Kakak, Adik, Keponakan serta teman-teman yang selalu senantiasa menemani dan memberikan motivasi.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi Program Wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah diimplementasikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023, dan Surat Keputusan BUMDes Abimantrana Nomor 18/BUMDES/ABI/V/2023. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang implementasi program yang dijalankan selama ini sudah optimal dalam proses pelaksanaannya. Penyimpulan tersebut mendasar dari faktor keberhasilan implementasi yaitu ukuran dan

tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana dan kondisi ekonomi sosial dan politik belum terpenuhi secara keseluruhan.

Ukuran dan tujuan kebijakan, pengelolaan program wisata Pantai Karangjahe memiliki dasar kebijakan yaitu Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera dengan adanya program pemberdayaan masyarakat meliputi pembukaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru. Serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tolak ukur keberhasilan dari implementasi program wisata Pantai Karangjahe di Desa Punjulharjo yaitu adanya peningkatan terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat dengan adanya masyarakat yang beraktivitas, meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes), dan banyaknya kunjungan wisata. Dalam ukuran dan tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik, karena adanya kunjungan wisata dan naik dalam setiap tahunnya, ada pemberdayaan masyarakat yaitu pelaku wisata adalah masyarakat Desa Punjulharjo, terjadinya kenaikan taraf perekonomian dan masyarakat menjadi sejahtera, serta Pendapatan Asli Desa (PADes) yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan munculnya minat masyarakat maka hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa (Utami et al., 2023).

Sumber daya manusia yang tersedia dalam pengelolaan wisata Pantai Karangjahe dirasa kurang memadai, karena sumber daya tidak terpenuhi secara keseluruhan, pada sumber daya manusia terdapat bagian pengembangan yang belum memiliki inovasi dan program-program baru untuk menunjang wisata Pantai Karangjahe yang jauh lebih baik dan lebih berpotensi untuk menambah daya tarik wisata yang semakin baik. Selain itu juga ada sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Rembang, bantuan sebesar 350 juta dari Dirjen Kemendes untuk jalan keluar wisata, serta untuk biaya operasional wisata Pantai Karangjahe berasal dari hasil tiket parkir, retribusi, uang sewa warung/ kios dan biaya perizinan operasional. Sumber daya fasilitas dimana fasilitas pendukung dan pelengkap notabene menjadi syarat mutlak demi menunjang desa wisata, namun dalam fasilitas masih memiliki kekurangan yaitu minimnya tempat sampah yang disediakan sehingga tidak sedikit sampah yang ada di area wisata yang tidak dibuang pada tempat sampah, beberapa toilet umum yang terlihat kotor karena dinding dan lantainya yang kurang terjaga.

Karakteristik agen pelaksana proses pelaksanaan program wisata Pantai Karangjahe sedari awal melibatkan begitu banyak pihak. Dalam hal ini seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo yaitu sudah memahami dan menjalankan perannya masing-masing termasuk masyarakat desa yang turut andil berpartisipasi dalam pengelolaan Program Desa Wisata Pantai Karang Jahe. Selain itu, pihak pengelola sebagai agen pelaksana juga memiliki tugas dan harus bertanggungjawab akan pekerjaannya sesuai dengan jobdesk masing-masing.

Disposisi sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam program wisata Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan sikap atau kecenderungan pelaksana sangat kompeten dari segi konsistensi pelaksana wewenang. Pemerintah daerah menjalankan fungsi mentoring. Kemudian unit pengelola wisata menjalankan fungsi operasional. Selain itu pihak unit pengelola juga memiliki pelayanan yang baik seperti pembayaran retribusi dengan ramah. Pemerintah daerah memiliki peran dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada desa wisata serta masyarakatnya dengan sosialisasi memberi pelatihan agar masyarakat desa lebih produktif. Sedangkan pemerintah desa melakukan pengawasan dan menjadi penasehat kepada Unit Wisata Pantai Karangjahe. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tugas untuk melihat laporan keuangan, dan ikut dalam pengambilan keputusan terkait program yang diusulkan. Unit pengelola Pantai Karangjahe memiliki sikap terbuka dan mau menerima kritik. Artinya, pelaksanaan kebijakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dukungan kondisi ekonomi, sosial, dan politik terlihat dari dukungan masyarakat terhadap pengembangan wisata Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo. Lini usaha yang berjalan dengan baik mendukung terbukanya kegiatan ekonomi bagi Desa Punjulharjo, dari aspek ekonomi, implementasi program desa wisata di Desa Punjulharjo ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat serta pendapatan asli desa juga meningkat dengan adanya wisata Pantai Karangjahe. Dalam lingkungan sosial masyarakat menjadi adaptif, jika dahulu menolak adanya program wisata Pantai Karangjahe namun saat ini mendukung karena dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Serta adanya dukungan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan program wisata Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana proses penyampaian program wisata Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo sudah berjalan baik, terbukti dengan

berbagai pemangku kebijakan yang terlibat memahami dan mematuhi perannya dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya antara Unit Pengelola Pantai Karangjahe dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintahan Desa, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, pihak swasta. Kegiatan komunikasi dilaksanakan dalam kegiatan rapat rutin terkait pelaporan keuangan, dan penyampaian program-program apa saja yang sedang berjalan, yang akan berjalan dan sudah berjalan yaitu setiap 1 bulan sekali antara unit pengelola Pantai Karangjahe, BUMDes, Pemerintah Desa dan Unit-unit yang berada di naungan BUMDes.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi bahwa diperlukan konsep yang jelas juga penambahan fasilitas di Wisata Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat tempat atau area kuliner dengan nama yang unik yang didalamnya terdapat makanan dan minuman khas Desa Punjulharjo. Lalu UMKM yang menjual cendera mata dan produk lokal lainnya seharusnya diberikan area sendiri agar kawasan wisata lebih rapi dan tertata. Tentunya nama harus unik agar pengunjung tertarik untuk datang.
- b. Pemerintah desa dan unit pengelola juga harus menambah tempat sampah di beberapa titik yang dirasa kurang agar dapat mencakup seluruh area dan menjadi lebih bersih, indah, dan nyaman. Khususnya pelaku wisata agar diberikan himbuan agar menjaga kebersihan dan diberikan tempat pembuangan sampah sendiri yang berbeda dengan pengunjung. Selanjutnya pemerintah desa dan unit pengelola juga harus lebih menekankan kebersihan pada toilet umum demi menjaga kenyamanan para pengunjung wisata Pantai Karangjahe Desa Punjulharjo.
- c. Unit Pengelola Wisata Pantai Karangjahe harus memperhatikan lagi terkait spot selfie, mungkin bisa ditambah lagi dan harus rajin dalam melakukan perawatan agar tidak rusak atau usang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur.M. (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jayanti. Indarti Dewi, Hardi Warsono, Herbasuki

- Nurchahyanto. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang. Universitas Diponegoro: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal Departemen Administrasi Publik.
- Kataya, Abdo. 2021. *“The Impact of Rural Tourism on the Development of Regional Communities.”* IBIMA Business Review 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). <https://jateng.bps.go.id/>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang. (2024). <https://rembangkab.go.id/teachers/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata/>
- Kasmad, R. (2018). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran,. Yogyakarta: Y.A.P, September.
- Kataya, A. (2021). The impact of rural tourism on the development of regional communities. *IBIMA Business Review*, 2021. <https://doi.org/10.5171/2021.652463>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI PADA BUMDES SAMBIMADU, DESA SAMBIBULU, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO). *Publika*, 10(2), 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Mustofa, A. (2021). *Keindahan Karang Jahe Beach, Salah Satu Juara Jambore Pokdarwis Jateng.* <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/30/190856881/keindahan-karang-jahe-beach-salah-satu-juara-jambore-pokdarwis-jateng?page=all>
- Nadina, A. P., & Dwimawanti, I. H. (n.d.). *MANAJEMEN OBJEK WISATA PANTAI KARANG JAHE DI KABUPATEN REMBANG.*
- Nurhajati, N., Pengembangan, D., Wisata, D., Peningkatan, T., Masyarakat, K., Di, S., Mulyosari, D., Pagerwojo, K., & Tulungagung, K. (n.d.). *DAMPAK PENGEMBANGAN DESA WISATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.*
- Redaksi Pemerintah Kabupaten Rembang. (2024). <https://rembangkab.go.id/berita/peringkat-tiga-sejateng-kunjungan-wisata-di-rembang-capai-305-688/>
- Ridwan, M. (2020). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(Ekonomi), 40–41.
- Sipayung, R. (2019). *TS157302 van meter.* 5–19.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* AIPI.
- Triyono, J., & Nugroho, D. Y. (2023). Pengembangan Ekowisata Bahari Pantai Karang Jahe Melalui Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(3), 340–350. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i3.2781>
- Utami, D. A., Mahmudah, L. N., Sahilla, F. I., Amaretta, F. R., Aini, K., & Sari, D. C. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(2), 97–104.s